

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

- Kota : Prabumulih
 Perangkat Daerah : DINAS KETAHANAN PANGAN
 Tugas : BIDANG KETAHANAN PANGAN
 Fungsi : (1) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
 (2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
 (3) Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
 (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan
 (5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan
 (6) Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan	Target
Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH = %AKE x bobot dibandingkan dengan Skor Maksimum	Sumarti, S.P., M.Si (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan adalah angka kualitas ketersediaan pangan penduduk di suatu wilayah berupa komposisi sembilan kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kecukupan gizi dan zat gizi lainnya. Skor PPH Ketersediaan yang tinggi menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk lebih beragam dan seimbang	94,3
Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	CBPK = [(A+P)/2] x 75% CBD	Sumarti, S.P., M.Si (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	PERUM BULOG KANWIL SUMSEL BABEL, dan Dinas Ketahanan Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Kota Prabumulih adalah persediaan pangan pokok yang dikelola oleh pemerintah bertujuan untuk: 1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah 2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana 3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga	7,8
Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH Konsumsi = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan yang sudah ditetapkan	Sumarti, S.P., M.Si (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Dinas Ketahanan Pangan	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah indikator yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan suatu daerah yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Skor PPH Konsumsi memiliki nilai maksimal 100. Semakin tinggi skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.	93,7

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan	Target
Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan = Jumlah Desa/Kel Pada Prioritas 1 s/d 3 dibagi jumlah desa/kel di Kota Prabumulih	Sumarti, S.P., M.Si (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, DiSDUKCAPIL, DISPERINDAG. dan BAPPEDA	Menurunnya daerah rentan rawan pangan adalah indikasi positif yang menunjukkan ketahanan pangan di suatu negara semakin membaik. Kerawanan pangan adalah kondisi ketika wilayah atau individu tidak memiliki cukup pangan yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.	2,70

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan	Target
Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	<p>1. Pengawasan di Peredaran Data yang dibutuhkan: a. Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T) b. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N) c. Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P)</p> <p>Capaian Pengawasan di Peredaran (Post market): Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y) = $P/N \times 100\%$ Capaian (K) = $Y/T \times 100\%$ Capaian Tertimbang (K1) = $K \times 60\%$</p> <p>2. Registrasi dan Sertifikasi (pre market) Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT, rumah kemas, health certificate (HC)). a. Capaian Provinsi Jumlah Sertifikasi dan Registrasi/tahun Capaian (X) >250 = 100% 151 - ≤250 = 80% 101 - ≤ 150 = 60% 51 - ≤ 100 = 40% < 50 = 20% Capaian tertimbang (K2) = $40\% \times X$</p>	Sumarti, S.P., M.Si (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan	Keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman adalah upaya untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan yang bergizi seimbang dan aman. Pangan yang sehat dan aman disebut juga dengan pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman). Kegiatan ini untuk memastikan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di masyarakat. Pengawasan PSAT dilakukan untuk mencegah PSAT terkontaminasi oleh bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan tersebut bisa berupa pestisida, mikotoksin, dan logam berat.	100,00

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	AA = > 90 - 100 A = > 80 - 90 BB = > 70 - 80 B = > 60 - 70 CC = > 50 - 60 C = > 30 - 50 D = 0 - 30	Sumarti, S.P., M.Si (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Inspektorat Kota Prabumulih	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan	74
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan dibagi jumlah laporan hasil pengawasan dikali 100%	Sumarti, S.P., M.Si (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Inspektorat Kota Prabumulih	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan. TLHP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dengan cara mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit.	100,00

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Sumarti, S.P., M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19740301 200312 2 003